



Impact of Value Added Tax Policy on Retail Sector and Public Consumption

Yehezkiel William Rassi^{1*}, Deva Olivia², Fathiyya Humairoh³, Maria Melisa Sutomo⁴, Nazwa Silva Fauziah⁵, Ahmad Setiawan Nuraya⁶
Indonesia Banking School

Corresponding Author: Fathiyya Humairoh fathiyyahumairoh5@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Value Added Tax, Retail Sector, Public Consumption, Economic Policy

Received : 20, February

Revised : 22, March

Accepted: 24, April

©2025 Rassi, Olivia, Humairoh, Sutomo, Fauziah, Nuraya: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Tax policy is a vital instrument in the management of a country's economy. In 2024, the Indonesian government decided to raise the Value Added Tax (VAT) rate from 10% to 12%. This policy triggered various significant impacts, especially on the retail sector and public consumption at large. This study aims to analyze in detail the impact of the VAT rate increase on the performance of the retail sector and public consumption patterns in Indonesia. The research method uses a qualitative approach with in-depth interview techniques, documentation analysis, and a comprehensive literature study. The results found a significant decline in retail sector turnover, changes in consumption patterns towards cheaper alternative products, and adaptation of marketing strategies by business actors to maintain business stability. This research provides policy implications that the government should consider in designing a fair taxation policy that supports national economic growth.

Dampak Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Sektor Ritel dan Konsumsi Masyarakat

Yehezkiel William Rassi^{1*}, Deva Olivia², Fathiyah Humairoh³, Maria Melisa Sutomo⁴, Nazwa Silva Fauziah⁵, Ahmad Setiawan Nuraya⁶
Indonesia Banking School

Corresponding Author: Fathiyah Humairoh fathiyahumairoh5@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Sektor Ritel, Konsumsi Masyarakat, Kebijakan Ekonomi

Received : 20, Februari

Revised : 22, Maret

Accepted: 24, April

©2025 Rassi, Olivia, Humairoh, Sutomo, Fauziah, Nuraya: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kebijakan perpajakan merupakan instrumen vital dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia memutuskan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12%. Kebijakan ini memicu berbagai dampak signifikan, terutama pada sektor ritel dan konsumsi masyarakat secara luas. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara rinci dampak kenaikan tarif PPN terhadap kinerja sektor ritel dan pola konsumsi masyarakat di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, analisis dokumentasi, dan studi literatur yang komprehensif. Hasil penelitian menemukan adanya penurunan omzet sektor ritel secara signifikan, perubahan pola konsumsi ke arah produk alternatif yang lebih murah, serta adaptasi strategi pemasaran yang dilakukan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas usaha. Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu instrumen utama dalam sistem perpajakan Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Penerimaan dari PPN digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan subsidi sosial. Untuk meningkatkan kapasitas fiskal dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, pemerintah Indonesia menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 12% pada tahun 2024.

Namun, kebijakan ini membawa konsekuensi ekonomi yang cukup signifikan, terutama bagi sektor ritel yang sangat bergantung pada konsumsi domestik. Kenaikan tarif pajak dapat menurunkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya memperlambat transaksi di sektor ritel, khususnya untuk produk non-esensial. Konsumen menjadi lebih selektif dalam pembelian, beralih ke produk substitusi yang lebih murah, atau mengurangi konsumsi barang tertentu. Perubahan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga merupakan pilar utama dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dampak kebijakan ini juga memengaruhi strategi bisnis pelaku usaha ritel. Baik perusahaan ritel besar maupun usaha kecil dan menengah (UKM) harus menyesuaikan strategi harga dan pemasaran untuk mengurangi dampak penurunan daya beli masyarakat. Beberapa perusahaan menawarkan diskon atau promosi untuk menarik pelanggan dan mempertahankan penjualan. Namun, bagi UKM yang memiliki margin keuntungan lebih rendah, penyesuaian ini menjadi tantangan yang lebih besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha mereka dalam jangka panjang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai Pajak tidak Langsung

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bentuk pajak tidak langsung yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa. Pajak ini dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, tetapi beban akhirnya ditanggung oleh konsumen. Kebijakan kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan harga barang dan jasa, yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dampak Kenaikan PPN terhadap Daya Beli Konsumen

Kenaikan tarif PPN dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa akibat PPN berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga. Dampak ini lebih terasa pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang memiliki elastisitas konsumsi tinggi terhadap perubahan harga. Daya beli yang menurun dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Pengaruh Kenaikan PPN terhadap Sektor Ritel

Industri ritel adalah salah satu sektor yang paling terdampak oleh kenaikan tarif PPN. Laporan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) tahun 2024 mencatat bahwa peningkatan tarif PPN memberikan tekanan signifikan pada omzet usaha ritel. Beberapa segmen ritel, terutama yang menjual barang konsumsi sekunder dan tersier, mengalami penurunan penjualan. Kenaikan harga akibat pajak memaksa pelaku usaha untuk memilih antara menaikkan harga jual atau menanggung penurunan margin keuntungan. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, mengungkapkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 berpotensi memperlambat pertumbuhan sektor ritel. Menurutnya, kenaikan harga produk akibat pajak ini dapat menekan konsumsi masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah. Tanpa kebijakan yang mendukung daya beli, pertumbuhan sektor ritel diperkirakan hanya akan mencapai satu digit atau di bawah 10%.

Pergeseran Pola Konsumsi Masyarakat akibat Kenaikan PPN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan tarif PPN menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Konsumen cenderung mencari produk substitusi yang lebih ekonomis untuk mengimbangi kenaikan harga barang. Pergeseran pola konsumsi ini juga terlihat dalam perubahan tren belanja, di mana masyarakat lebih banyak beralih ke platform belanja online yang menawarkan lebih banyak diskon dan promosi. Selain itu, APPBI memperkirakan bahwa tanpa adanya langkah mitigasi, kenaikan tarif PPN akan menekan konsumsi domestik yang merupakan pilar utama pertumbuhan ekonomi. Momen-momen penting dalam sektor ritel, seperti Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, berisiko mengalami penurunan transaksi akibat daya beli yang melemah.

Kebijakan Kompensasi terhadap Dampak Kenaikan PPN

Beberapa penelitian akademik mengemukakan bahwa kebijakan kenaikan PPN perlu diimbangi dengan langkah-langkah kompensasi agar dampaknya tidak terlalu besar terhadap perekonomian. Bentuk kompensasi yang dapat diberikan antara lain berupa insentif pajak bagi sektor usaha yang terdampak atau subsidi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. APPBI berharap pemerintah meninjau ulang rencana kenaikan tarif PPN atau setidaknya memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat. Jika kebijakan kenaikan tarif tetap diberlakukan tanpa adanya insentif, maka sektor ritel akan mengalami tekanan lebih besar, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sektor ritel dan pola konsumsi masyarakat. Data dari sumber-sumber resmi yang kredibel, sehingga hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai implikasi kebijakan tersebut. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan interpretasi terhadap tren ekonomi yang muncul akibat perubahan kebijakan fiskal. Dengan memanfaatkan berbagai sumber data, penelitian ini tidak hanya menyoroti dampak langsung kenaikan PPN, tetapi juga pada dinamika ekonomi yang terjadi akibat perubahan daya beli dan strategi adaptasi pelaku usaha dalam menghadapi kondisi tersebut.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari laporan resmi instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan laporan tahunan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada jurnal akademik, laporan riset ekonomi, dan publikasi dari lembaga keuangan nasional serta internasional yang relevan dengan kebijakan perpajakan dan dampaknya pada sektor ritel. Dengan berbagai sumber data ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai efek kebijakan kenaikan PPN. Teknik pengumpulan data mencakup studi dokumen dan analisis laporan resmi terkait topik penelitian. Studi literatur juga penting, terutama untuk membandingkan kebijakan PPN di Indonesia dengan negara lain yang memiliki kondisi ekonomi serupa. Metode ini membantu peneliti memahami pola kebijakan yang diterapkan sebelumnya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan fiskal.

Teknik Analisis dan Validasi Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi data historis mengenai kebijakan perpajakan serupa, dampaknya terhadap sektor ekonomi terkait, serta pola konsumsi masyarakat sebelum dan sesudah perubahan tarif PPN. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara kenaikan PPN dengan variabel ekonomi yang terdampak, seperti daya beli konsumen dan volume transaksi ritel. Selain itu, perbandingan dengan kebijakan di negara lain yang mengalami kondisi serupa juga digunakan untuk memperkuat interpretasi hasil penelitian. Validasi data dilakukan melalui triangulasi informasi dari berbagai sumber guna memastikan akurasi temuan. Triangulasi ini mencakup perbandingan antara data dari instansi pemerintah, publikasi akademik, dan laporan industri untuk menghindari bias dalam analisis. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat dan dapat diandalkan dalam mengevaluasi dampak kebijakan kenaikan PPN terhadap sektor ritel dan pola konsumsi masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Kenaikan PPN terhadap Omzet Sektor Ritel

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdampak langsung pada harga barang dan jasa di pasar ritel. Berdasarkan hasil analisis data sekunder, ditemukan bahwa omzet sektor ritel mengalami penurunan rata-rata sebesar 10% hingga 15% dalam enam bulan pertama. Penurunan ini terutama dirasakan oleh segmen ritel yang menjual produk sekunder dan tersier, seperti elektronik, pakaian bermerek, serta barang konsumsi non-primer lainnya. Konsumen cenderung menahan pengeluaran untuk barang yang dianggap tidak mendesak, sehingga pelaku usaha yang bergerak di sektor ini mengalami kesulitan dalam mempertahankan penjualan mereka. Selain itu, data dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia menunjukkan bahwa toko ritel modern mengalami tekanan lebih rendah dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini dikarenakan ritel modern memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam menerapkan strategi harga dan promosi, sedangkan UKM menghadapi keterbatasan modal dan sumber daya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan harga.

Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat

Kenaikan PPN berdampak tidak hanya pada pelaku usaha ritel, tetapi juga pada konsumen yang harus menyesuaikan pola konsumsi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas masyarakat mulai lebih selektif dalam pengeluaran setelah kebijakan ini diterapkan, dengan mengurangi pembelian barang sekunder dan tersier, sementara permintaan produk primer seperti makanan pokok tetap stabil. Selain itu, muncul fenomena substitusi produk, di mana konsumen beralih ke produk lebih terjangkau dalam kategori yang sama, seperti memilih merek lokal daripada produk impor yang lebih mahal. Tren serupa juga terlihat di sektor jasa, di mana masyarakat mencari alternatif layanan lebih hemat biaya. Pergeseran pola konsumsi ini lebih dirasakan oleh kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, yang semakin terbatas dalam pengelolaan keuangan mereka akibat kenaikan harga. Hal ini dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional karena konsumsi rumah tangga merupakan faktor utama dalam pergerakan ekonomi.

Strategi Adaptasi Pelaku Usaha Ritel

Sebagai respons terhadap perubahan perilaku konsumen, pelaku usaha ritel menerapkan berbagai strategi adaptasi untuk mempertahankan bisnis. Salah satunya adalah pemberian diskon dan promosi harga, seperti potongan harga atau program bundling, untuk menarik kembali minat konsumen. Selain itu, banyak pelaku usaha yang memperkuat kehadiran mereka di platform digital dan e-commerce untuk menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa bergantung pada toko fisik. Penggunaan layanan pembayaran digital dan program loyalitas pelanggan juga semakin meningkat untuk mempertahankan basis pelanggan. Namun, strategi ini tidak mudah diterapkan oleh semua pelaku usaha, terutama UKM yang terbatas dalam hal modal dan akses teknologi. Banyak UKM yang kesulitan menyesuaikan harga dan bersaing dengan pemain ritel besar, bahkan melaporkan penurunan omzet hingga 20%, yang memberikan tekanan finansial yang signifikan.

Implikasi Makroekonomi dari Kenaikan PPN

Dari sisi makroekonomi, kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, namun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi perlu dipertimbangkan. Meskipun dalam jangka pendek kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak, penurunan konsumsi rumah tangga berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Menurut data Kementerian Keuangan, kenaikan PPN sebesar 1% diperkirakan meningkatkan inflasi sebesar 0,4% dan menurunkan PDB sebesar 0,1%. Penurunan ini menunjukkan bahwa melemahnya daya beli masyarakat dapat berdampak negatif pada aktivitas ekonomi jangka panjang. Jika tren ini berlanjut, penerimaan pajak yang diharapkan meningkat malah bisa stagnan karena rendahnya transaksi ekonomi. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah perlu mempertimbangkan insentif pajak untuk sektor-sektor yang terdampak, seperti UKM dan usaha ritel kecil. Selain itu, pemberian subsidi atau bantuan sosial kepada kelompok berpenghasilan rendah dapat membantu menjaga daya beli mereka, sehingga dampak negatif terhadap konsumsi dapat diminimalkan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kenaikan tarif PPN berdampak signifikan pada sektor ritel dan pola konsumsi masyarakat, dengan menyebabkan penurunan omzet ritel, peralihan konsumsi ke produk alternatif yang lebih murah, dan penurunan daya beli konsumen. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga usaha kecil dan menengah yang lebih rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal. Selain itu, kenaikan PPN dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek akibat penurunan aktivitas konsumsi. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, hasil yang diharapkan mungkin tidak tercapai secara optimal jika sektor ritel mengalami stagnasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan kebijakan pendukung sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberi tekanan ekonomi yang terlalu berat pada masyarakat dan dunia usaha.

Untuk mengurangi dampak negatif kenaikan PPN, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pelengkap, seperti memberikan insentif fiskal bagi UMKM berupa keringanan pajak atau subsidi bagi sektor terdampak. Selain itu, edukasi publik tentang perpajakan perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami tujuan kebijakan ini dan mengurangi resistensi. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok berpenghasilan rendah untuk menjaga daya beli mereka. Penyesuaian tarif PPN untuk barang kebutuhan pokok juga perlu dipertimbangkan agar tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Evaluasi berkala terhadap kebijakan sangat penting untuk memastikan manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Secara keseluruhan, kenaikan PPN perlu diimbangi dengan strategi pendukung yang tepat agar dampak negatifnya dapat diminimalkan, sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

PENELITIAN LANJUTAN

Setiap penelitian memiliki keterbatasan; dengan demikian, Anda dapat menjelaskannya di sini dan secara singkat memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini memberi Anda kesempatan untuk menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Anda yang memberikan saran untuk makalah Anda. Anda juga dapat menyampaikan penghargaan Anda atas bantuan keuangan yang Anda terima, dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). (2024). Dampak Kebijakan Pajak terhadap Industri Ritel di Indonesia. Jakarta: APPBI.
- Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Sektor Ritel 2024. Jakarta: APBI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Laporan Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2023-2024. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Laporan Konsumsi dan Daya Beli Masyarakat. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. (2024). Tren Inflasi dan Konsumsi Pasca Kebijakan Fiskal 2024. Jakarta: Bank Indonesia.
- Feldstein, M. (2018). Effects of Taxes on Economic Behavior. National Bureau of Economic Research Working Paper. Cambridge, MA: NBER.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Evaluasi Kebijakan Pajak 2024: Implikasi dan Prospek. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Kenaikan Tarif PPN dan Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kontan.co.id. 2024. Kenaikan PPN Jadi 12% Berisiko Tekan Pertumbuhan Industri Ritel. [online] 18 November. Tersedia di: <https://industri.kontan.co.id/news/kenaikan-ppn-jadi-12-berisiko-tekan-pertumbuhan-industri-ritel> [Diakses 18 Maret 2025].
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). Consumption Tax Trends 2023: VAT/GST and Excise Rates, Trends, and Policy Issues. Paris: OECD Publishing.
- Rahman, A., & Santoso, D. (2022). Impact of Value-Added Tax Increase on Consumer Behavior in Indonesia: A Quantitative Study. *Journal of Economic Studies*, 15(2), 112-128.
- Rizky, P. & Wijaya, T. (2021). Kenaikan Pajak dan Daya Beli Konsumen: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 14(1), 55-72.